

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.
Nurjannah, S.Pd., M.Pd.



PEREKONOMIAN INDONESIA



Editor: Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Nurjannah, S.Pd., M.Pd.



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEREKONOMIAN INDONESIA

Penulis:

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Nurjannah, S.Pd., M.Pd.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii,143, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-185-7

Cetakan Pertama:

Oktober 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subehanahu Wata'ala atas lindungan dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan buku ajar dengan Judul “Perekonomian Indonesia”.

Buku dengan judul “Perekonomian Indonesia” Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: 1) Sejarah Perekonomian Indonesia, 2) Sistem-sistem Ekonomi di Indonesia, 3) Sistem Pertanian di Indonesia, 4) Definisi Industri dan Industrialisasi, 5) Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia, 6) Penduduk dan Ketenagakerjaan, 7) Pengeluaran Pemerintah, dan 8) Sektor Moneter, Perbankan dan Pembiayaan.

Akhir kata Dengan terbitnya buku ini, harapan penulis ialah menambah Khazanah Keilmuan di bidang koperasi dan dapat dinikmati oleh kalangan pembaca baik Akademisi, Dosen, Peneliti, Mahasiswa atau Masyarakat pada Umumnya.

Makassar, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Bab 1 Sejarah Perekonomian Indonesia	1
A. Sejarah Perekonomian Indonesia Sebelum Kemerdekaan.....	1
B. Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama	6
C. Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Orde Baru	8
Daftar Pustaka	17
Bab 2 Sistem-Sistem Ekonomi Di Indonesia	19
A. Pengertian Sistem Ekonomi.....	19
B. Macam-Macam Sistem Ekonomi.....	20
C. Sistem Perekonomian Indonesia	28
Daftar Pustaka.....	33
Bab 3 Sektor Pertanian Di Indonesia.....	35
A. Pengertian Pertanian	35
B. Pengertian Sektor Pertanian.....	36
C. Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia.....	38
D. Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia.....	41
E. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	45
F. Syarat-Syarat Pembangunan Pertanian.....	46
G. Peluang Usaha Pertanian	46
H. Permasalahan Dan Tantangan Sektor Pertanian	50
Bab 4 Definisi Industri Dan Industrialisasi	53
A. Definisi Industri.....	53
B. Definisi Industrialisasi	53
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Sektor Industri	55
D. Teori Yang Melandasi Kebijakan Industrialisasi.....	56
E. Pengukuran Daya Saing Industri	57
F. Peranan Industri Terhadap Perekonomian	59
G. Strategi Industrialisasi	60
H. Klasifikasi Industri	63
I. Industri Yang Berperan Penting Dalam Pendapatan Nasional	68
Daftar Pustaka	70

Bab 5 Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia	72
A. Pendahuluan.....	72
B. Kesenjangan Pendapatan Dan Kemiskinan	73
C. Faktor - Faktor Kesenjangan Pendapatan Dan Kemiskinan	78
D. Cara Menanggulangi Kesenjangan Pendapatan Dan Kemiskinan...	80
E. Indikator Kesenjangan Dan Kemiskinan	82
F. Dampak Kesenjangan Dan Kemiskinan	83
Kesimpulan.....	84
Daftar Pustaka	85
Bab 6 Penduduk Dan Ketenagakerjaan	86
A. Konsep Penduduk Dan Kependudukan	86
B. Konsep Ketenagakerjaan	88
C. Permasalahan Kependudukan Beserta Kebijakannya.....	89
D. Permasalahan Ketenagakerjaan Beserta Kebijakannya	94
E. Studi Kasus Pt. Medco Lestari Papua.....	95
F. Kekerasan Pada Wanita Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center.....	97
Daftar Pustaka	99
Bab 7 Pengeluaran Pemerintah.....	100
A. Definisi Pengeluaran Pemerintah	100
B. Pengeluaran Di Berbagai Sektor.....	103
C. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	105
D. Intervensi (Campur Tangan) Dan Fungsi Ekonomi Pemerintah....	110
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pengeluaran Pemerintah	111
F. Studi Kasus: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Provinsi Bengkulu.....	112
G. Studi Kasus: Perencanaan Pemerintah Daerah Riau Di Masa Pandemi Virus Corona.....	114
Daftar Pustaka	117
Bab 8 Sektor Moneter, Perbankan Dan Pembiayaan.....	119
A. Definisi Kebijakan Moneter	119
B. Tujuan Dan Kerangka Strategis Kebijakan Moneter	120
C. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter.....	124

D.	Tujuan Dan Jenis Kebijakan Moneter	128
E.	Kebijakan Moneter Di Indonesia.....	128
F.	Perbankan	129
G.	Kegiatan-Kegiatan Bank.....	133
H.	Kontribusi Kredit Perbankan Bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	134
I.	Pembiayaan.....	135
J.	Jenis-Jenis Pembiayaan	141
	Daftar Pustaka	143

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

A. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN

Sebelum kemerdekaan Indonesia, perekonomian Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda. Pada masa tersebut, ekonomi Indonesia lebih banyak terfokus pada pengembangan sektor perkebunan, terutama kopi, tembakau, tebu, karet, dan kelapa sawit yang diusahakan oleh Belanda (Safitri, 2017). Sistem ekonomi pada masa penjajahan ini didasarkan pada monopoli perdagangan yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan Belanda, seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM). Selain itu, sistem pajak juga menjadi sumber utama penerimaan pemerintah kolonial, dengan pungutan pajak yang tinggi terhadap petani dan buruh. Berikut beberapa masa sebelum kemerdekaan Indonesia antara lain:

1. Masa Kerajaan

Sejarah perekonomian Indonesia pada masa kerajaan berlangsung selama ratusan tahun dan sangat dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan antar negara (Mahfudzoh, 2018). Beberapa kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menguasai jalur perdagangan internasional yang strategis di wilayah Asia Tenggara dan mengembangkan ekonomi mereka melalui aktivitas perdagangan. Sriwijaya, misalnya, dikenal sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan utama di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-13. Kerajaan ini mengendalikan seluruh jalur perdagangan rempah-rempah dari India hingga Cina, dan memperoleh keuntungan besar dari kegiatan perdagangan tersebut. Majapahit pada abad ke-14 hingga ke-16 merupakan kerajaan yang kuat dan makmur di Indonesia. Ekonomi Majapahit didukung oleh sektor pertanian yang maju, terutama dalam produksi beras, gula, dan kapas. Selain itu, kerajaan ini juga mengembangkan sektor perdagangan yang aktif, terutama perdagangan emas, perak, dan hasil bumi lainnya (Jamil & Santosa, 2017).

Pada masa kerajaan Mataram (abad ke-16 hingga ke-18), perekonomian Indonesia berkembang melalui sektor perdagangan dan pertanian yang dikuasai oleh para bangsawan (Safitri, 2017). Sektor pertanian, terutama dalam produksi beras, tetap menjadi sektor utama dalam perekonomian pada masa ini. Perdagangan internasional juga tetap menjadi aktivitas penting pada masa kerajaan, terutama dalam perdagangan rempah-rempah, kayu, gading, emas, dan perak. Selain itu, pada masa ini juga terjadi pengembangan sektor kerajinan dan industri rumah tangga, seperti pembuatan kain dan perak, yang dikuasai oleh masyarakat desa (Zulkarnain, 2016). Meskipun perekonomian Indonesia pada masa kerajaan sangat tergantung pada sektor pertanian dan perdagangan internasional, namun pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah mengembangkan sistem ekonomi yang kompleks dan maju dalam mengelola kekayaan alam dan hasil bumi. Pengaruh dari sejarah perekonomian pada masa kerajaan tersebut masih dapat dilihat dalam kehidupan ekonomi Indonesia saat ini.

2. Masa Penjajahan Portugis

Penjajahan Portugis di Indonesia dimulai pada abad ke-16, khususnya di wilayah Maluku yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala (Safitri, 2017). Eksploitasi sumber daya alam inilah yang kemudian menjadi dasar perekonomian Portugis di Indonesia pada masa itu. Portugis membuka perdagangan dengan penduduk lokal dan mendirikan pelabuhan di Maluku serta daerah-daerah lain di Indonesia. Mereka mengambil alih kendali perdagangan rempah-rempah dan mengeksportnya ke Eropa. (Affairs, 2013) Portugis juga mulai menanam tanaman rempah-rempah secara komersial, sehingga meningkatkan produksi dan ekspor. Selain perdagangan rempah-rempah, Portugis juga mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan di daerah-daerah yang mereka kuasai. Mereka memperkenalkan tanaman baru seperti jagung, kacang-kacangan, dan singkong, serta membawa hewan ternak dari Eropa seperti sapi, kuda, dan babi. Namun, perekonomian Portugis di Indonesia pada masa penjajahan tidak berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan teknologi dan modal, serta persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol. Portugis akhirnya kehilangan

dominasinya di Indonesia pada awal abad ke-19 dan digantikan oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya (Mahfudzoh, 2018).

3. Masa Monopoli VOC

Sejarah perekonomian Indonesia pada masa monopoli VOC terjadi sekitar tahun 1600-1800 masehi. Masa monopoli VOC ini diawali dari kedatangan orang Belanda ke Indonesia dengan tujuan melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Hasibuan, 2018). Para pedagang Belanda tersebut melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku dengan cara yang sangat rapi. VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) atau persatuan pedagang Belanda dalam membeli barang dagangan Indonesia terutama rempah-rempah menerapkan sistem monopoli, sehingga para pedagang nusantara merasa tertekan karena harga ditentukan secara sepihak oleh VOC (Mubyarto, 2002). Tidak hanya itu, pihak VOC juga membuat kesepakatan dengan para pedagang lokal yaitu hasil panen rempah seluruhnya diberikan kepada pihak VOC dengan imbalan pedagang lokal akan mendapatkan perlindungan militer dari serangan-serangan pihak lain (Purwanda, 2022).

Pada tahun 1641, Malaka berhasil direbut oleh VOC dari tangan Portugis. Sehingga membuat kedudukan VOC semakin kuat pada saat itu. Setelah berhasil direbut, Malaka dijadikan sebagai pangkalan angkatan laut oleh VOC dan di selat Malaka VOC melakukan pengawasan proses perdagangan. Pada saat itu juga, Jakarta menjadi Bandar yang semakin ramai karena seluruh arus perdagangan di Malaka disalurkan ke Jakarta. Dan VOC mulai memusatkan perdagangan di Indonesia pada tahun 1641 (Hasibuan, 2018). Kedudukan VOC juga semakin kuat karena sebagai sebuah kongsi dagang, VOC memiliki hak istimewa (hak *octroi*). Adapun hak istimewa yang dimiliki oleh VOC diantaranya adalah:

- a. VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan di wilayah Tanjung Harapan-Selat Magelhaens, dan juga termasuk wilayah pulau-pulau Nusantara.
- b. VOC menciptakan angkatan militer sendiri yang disebut *Companie*.
- c. VOC memiliki hak untuk berperang dengan Negara lainnya.
- d. VOC dapat mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat.

- e. VOC berhak mencetak uang sendiri.
- f. VOC merupakan wakil pemerintah Belanda di Asia.
- g. VOC berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai sendiri.
- h. VOC berhak mengadakan pemungutan pajak.

Walaupun pada saat itu para pedagang Belanda telah melakukan perdagangan dengan serapi mungkin, akan tetapi bangsa lain berhasil menemukan celah untuk menjatuhkan VOC, sebagaimana yang dilakukan “Pierre Poivre” asal Prancis pada sekitar tahun 1770 yang berani untuk menyelundupkan cengkeh kurang lebih 300 benih pala muda sebanyak 20.000 benih ke wilayah kepulauan Mauritius dengan taruhannya adalah nyawa sendiri (Purwanda, 2022). Dan berbagai cara-cara yang dilakukan oleh bangsa lain untuk menjatuhkan kekuasaan monopoli VOC di Indonesia, sehingga pada akhirnya VOC bubar pada tahun 1799 karena pemerintah Belanda telah kehabisan cara untuk mengeksploitasi Indonesia, dan kemudian penguasaan Indonesia diambil alih sementara oleh Inggris yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Robert Raffles yang memperkenalkan sistem sewa tanah dengan tujuan tanah jajahan dapat efisien.

4. Masa Kependudukan Jepang

Kependudukan Jepang di Indonesia terjadi pada tahun 1942-1945 yang berakhir dengan ditandai proklamasi kemerdekaan Indonesia (Amelia, 2020). Masa kependudukan Jepang merupakan penentu perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan datangnya Jepang ke Indonesia juga menandakan kekuasaan Hindia-Belanda telah berakhir. Pada mulanya, kedatangan penduduk Jepang di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari rakyat Indonesia dikarenakan mereka menganggap Indonesia sebagai saudara tua yang akan membantu bangsa Indonesia agar dapat bebas dari jajahan bangsa lain. Namun hal itu terjadi hanya beberapa bulan saja, setelah itu Jepang mulai menampakkan kekejamannya dengan merampas kekayaan alam, melakukan penindasan, dan juga memeras tenaga dari rakyat Indonesia.

Pada masa kependudukannya, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang, karena pada saat itu Jepang sedang menghadapi sekutu sehingga kebijakan ekonomi dialihkan untuk memenuhi kepentingan perang (Aderoben & Septiansi, 2022). Dengan diterapkannya sistem ekonomi

perang ini, mengakibatkan terjadinya penyitaan perkebunan, pabrik, bank, dan lainnya sehingga membuat rakyat Indonesia pada saat itu mengalami kemiskinan, produksi pangan menurun dan terjadi pula kelaparan (Adji, 2020). Maka dari itu, rakyat memilih untuk menjadi *Romusha* (sistem kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang) adapun pekerjaan yang dilakukan adalah membangun infrastruktur, benteng pantai, lubang perlindungan, dan pabrik amunisi.

Adapun beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Jepang di Indonesia yaitu (Kurniawan, 2020):

- 1) Pada tahun 1944, pemerintah Jepang mulai mengadakan penyerahan bahan pangan secara besar-besaran karena kebutuhan perang semakin meningkat.
- 2) Jepang menerapkan sistem Autarki.
- 3) Tanaman teh, kopi, dan tembakau dibatasi karena tidak berpengaruh untuk keperluan militer.
- 4) Pengawasan ekonomi dilakukan secara ketat dan memberikan sanksi pelanggaran yang berat.

Meskipun masa pendudukan Jepang hanya 3,5 tahun, tetapi membuat rakyat Indonesia sangat menderita dibandingkan masa penjajahan sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehidupan yang semakin sulit dialami oleh rakyat Indonesia, banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai dan pada saat itu juga terjadi inflasi yang sangat parah yang disebabkan tidak ada jaminan terhadap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, jumlah barang kebutuhan sangat sedikit sehingga sulit untuk diperoleh serta harganya yang sangat mahal (Adji, 2020).



(Sumber: Canva, 2023)

Gambar 1.1 Skema Sejarah Perekonomian Indonesia Sebelum Kemerdekaan

B. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE LAMA

Pada masa orde lama, perekonomian Indonesia masih sangatlah buruk. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia masih belum lepas dari jajahan Belanda. walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi peperangan antara Belanda dan Indonesia masih terjadi di tahun 1940-an (Fahriska & Zulkifli, 2020). Masa orde lama terjadi pada tahun 1945-1968 pada saat itu merupakan masa pemerintahan Ir. Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan. Pada masa orde lama, Negara Indonesia menganut sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Soekarno juga menerapkan beberapa kebijakan perekonomian yang terdiri dari:

- 1) De Javasche Bank milik Belanda dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia.
- 2) Usaha yang bersangkutan dengan martabat orang banyak diamankan.
- 3) Berupaya untuk menghilangkan control Belanda dalam kegiatan perdagangan ekspor-impor.

- 4) Dan kebijakan lainnya yang dibuat agar perekonomian Indonesia mengalami kemajuan.



(Sumber: Canva,2023)

Gambar 1.2 Kebijakan perkenomian Indonesia pada masa orde lama

Meskipun Soekarno telah mengeluarkan beberapa kebijakan akan tetapi kebijakan tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan beberapa penyebab, diantaranya:

- a. Keadaan politik yang propaganda dan sabotase.
- b. Kabinet Soekarno mengalami jatuh bangun sehingga tidak mampu melakukan kebijakan sebaik mungkin. Hal tersebut dikarenakan adanya pertarungan antar politik.
- c. Basis borjuis yang lemah, sedangkan dianggap mampu menjadi kekuatan dalam perekonomian dan dianggap mampu mendorong industrialisasi.

Penyebab lain buruknya perekonomian pada masa orde lama adalah Infrastruktur ekonomi fisik maupun non-fisik yang hancur, karena adanya perang-perang yang terjadi pada era sebelumnya, dan manajemen ekonomi makro selama rezim sangat buruk. Pada masa orde lama, perekonomian Indonesia sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata sebesar 7% per tahunnya selama dekade 1950-an. Kemudian mengalami penurunan yang

sangat drastis menjadi 1,9% sehingga berakibat terjadinya stagflasi pada tahun 1965-1966. Dimana pada saat itu, PDB Indonesia hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia kesulitan ekonomi pada masa orde lama adalah pada bulan Juli tahun 1946, Menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP melakukan program pinjaman nasional, berusaha untuk menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia, dalam memperoleh kesepakatan untuk mengatasi masalah ekonomi pada saat itu dilakukan Konferensi Ekonomi pada Februari tahun 1946 (Fahrika & Zulkifli, 2020).

C. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE BARU

Zulkarnain (2016) Orde Baru adalah periode kekuasaan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di Indonesia. Pada masa ini, pemerintah mengambil tindakan-tindakan ekonomi yang berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu dengan mengimplementasikan konsep ekonomi pancasila yang berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional yang terpadu dan berkeadilan. Dalam upaya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1965, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan industri dan pertanian. Hal ini dilakukan dengan memperkuat sektor manufaktur dan meningkatkan produksi pangan dan komoditas pertanian. Namun, kebijakan ini juga berdampak pada kesenjangan antara kota dan desa serta antara kelompok kaya dan miskin. Selain itu, pada masa Orde Baru juga terjadi peningkatan investasi asing, terutama dari negara-negara barat dan Jepang. Investasi asing ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan ketergantungan pada investor asing dan memperburuk masalah ketimpangan ekonomi (Rahardjo 2009).

1. Pengaruh politik ekonomi Orde Baru terhadap Indonesia

Pada masa Orde Baru (1966-1998), politik ekonomi yang diterapkan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Berikut beberapa pengaruh politik ekonomi Orde Baru terhadap Indonesia:

a. Peningkatan pembangunan infrastruktur

Pemerintah Orde Baru memperkenalkan pembangunan infrastruktur skala besar, termasuk pembangunan jalan raya,

jembatan, pelabuhan, bandara, dan PLTU. Hal ini membantu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan.

b. Pertumbuhan industri dalam negeri

Pemerintah Orde Baru mendorong perkembangan industri dalam negeri melalui kebijakan pengamanan nasional, perlindungan pasar dalam negeri, dan pengendalian impor. Industri-industri yang berkembang pada masa itu meliputi industri tekstil, elektronik, dan baja. Meskipun banyak kritik bahwa kebijakan ini menyebabkan industri dalam negeri tumbuh lambat dan sulit bersaing di pasar global.

c. Ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditas

Pemerintah Orde Baru mengandalkan ekspor komoditas seperti minyak mentah, gas alam, dan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama. Hal ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan permintaan pasar.

d. Pengaruh pemerintah dalam sektor ekonomi

Pemerintah Orde Baru memiliki pengaruh besar dalam sektor ekonomi melalui kepemilikan perusahaan BUMN dan perusahaan milik keluarga presiden serta elit politik. Hal ini menyebabkan sektor swasta tumbuh lambat dan cenderung bergantung pada kebijakan pemerintah.

e. Ketidaksetaraan sosial ekonomi

Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru, namun ketidaksetaraan sosial-ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Hal ini karena kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, sementara program kesejahteraan sosial tidak cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

2. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur

Pada masa Orde Baru di Indonesia, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Orde Baru mengadopsi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur. (Jamil and Santosa 2017) Beberapa contoh

proyek infrastruktur besar yang dibangun pada masa Orde Baru antara lain pembangunan jalan tol, pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi, pembangunan bandara dan pelabuhan, serta pembangunan proyek-proyek energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru berhasil membangun fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan industri dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur juga berhasil membuka akses pasar baru bagi produk-produk dan meningkatkan daya saing suatu daerah (Rahardjo 2009). Namun, pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru juga memiliki dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan kemungkinan eksploitasi terhadap masyarakat setempat. Selain itu, pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru juga diwarnai oleh kontroversi terkait dengan tata kelola proyek-proyek infrastruktur yang dianggap tidak transparan dan rentan terhadap korupsi.

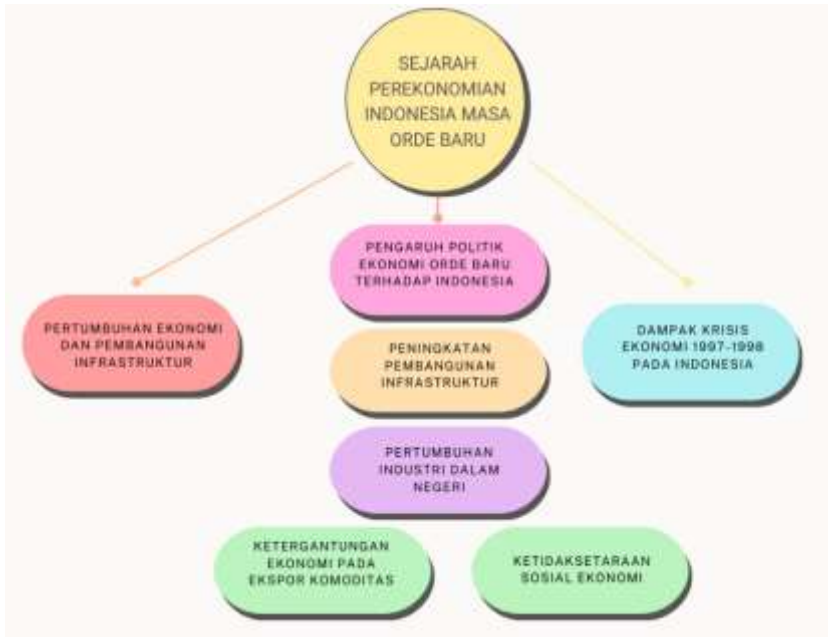
Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru dapat dianggap berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai dapat menjadi faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Dampak krisis ekonomi 1997-1998 pada Indonesia

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia dan pada masa Orde Baru. Dampak utama dari krisis ekonomi ini adalah penurunan drastis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang memicu inflasi yang tinggi dan peningkatan harga barang (Affairs 2013). Pada masa Orde Baru, pemerintah mengadopsi kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi, yang lebih banyak terfokus pada pengembangan industri manufaktur dan penggunaan modal asing. Namun, krisis ekonomi pada akhirnya menunjukkan bahwa model pembangunan ini kurang berkelanjutan dan rentan terhadap guncangan ekonomi global. Dampak krisis ekonomi pada masa Orde Baru juga terlihat dalam sektor keuangan, dimana terjadi krisis likuiditas dan gagal bayar pada bank-bank dan perusahaan besar di Indonesia (Jamil and

Santosa 2017). Hal ini menyebabkan banyaknya pengusaha dan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga menyebabkan penurunan lapangan kerja dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Selain itu, dampak krisis ekonomi pada masa Orde Baru juga menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial dan politik, seperti kerusuhan etnis di beberapa wilayah Indonesia. Krisis ekonomi ini juga membuka jalan bagi terjadinya reformasi politik yang menggulingkan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. (Jamil and Santosa 2017) Secara keseluruhan, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial. Krisis ini juga memunculkan kelemahan dari model pembangunan ekonomi Orde Baru yang perlu diperbaiki agar lebih berkelanjutan dan mampu menghadapi guncangan ekonomi global.



(Sumber: Canva,2023)

Gambar 1.3. Skema Sejarah Perekonomian Indonesia pada masa orde baru

4. Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Reformasi

Masa reformasi adalah istilah yang ditujukan kepada kekuasaan setelah orde baru. Era reformasi di Indonesia juga dikenal dengan era pasca soeharto. Reformasi di Indonesia diawali dengan pengunduran diri otoriter soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak pengunduran diri tersebut, Indonesia berada dalam masa transisi yang hingga kini dikenal dengan sebutan era reformasi. Reformasi merupakan perubahan catatan kehidupan lama menuju catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi lahir sebagai jawaban atas terjadinya krisis ekonomi pada masa orde baru. Reformasi dianggap sebagai gerakan yang tidak bisa ditawar-tawar, karena hampir semua masyarakat Indonesia mendukung penuh adanya gerakan reformasi tersebut. Masalah yang menyebabkan lahirnya reformasi ialah kesulitan rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Harga sembako seperti beras, telur, minyak goreng, susu, ikan, garam, minyak tanah, dan terigu mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi (Klaudia & Wartha, 2020).

1. Pemerintahan BJ Habibie

Era reformasi dimulai saat BJ Habibie menggantikan Soeharto menjadi presiden Republik Indonesia. Pada masa itu terjadi krisis finansial yang melanda Asia pada 1997 menyebabkan penurunan pada perekonomian Indonesia sebesar 13%, serta terjadinya penurunan nilai tukar rupiah. Untuk menindaklanjuti masalah krisis ekonomi ini pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk mendapatkan pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Pinjaman ini dimulai dengan ditandatanganinya Letter Of Intent (LOI) yang pertama kali dilakukan pada akhir bulan Oktober pada tahun 1997 (Aswicahyono & Christian, 2017).

Pada masa pemerintahan presiden Habibie beliau fokus pada pemulihan perekonomian Indonesia. Selain itu beliau juga memfokuskan memperbaiki politik dan kehidupan demokrasi Indonesia, karena menurut beliau dengan adanya stabilitas politik yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan para investor dari luar negeri yang dapat sangat membantu pemulihan ekonomi Indonesia saat itu. Hal tersebut berdampak baik terhadap

pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan yang awalnya berada di angka negatif dan kemudian pada tahun 1999 mulai positif walaupun masih rendah. Ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan presiden Habibie tersebut perekonomian Indonesia mulai bangkit. Nilai kurs rupiah terhadap dollar mulai meningkat dan inflasi mulai turun. Namun selain kabar baik tersebut saat itu sempat terjadi goncangan dalam pemerintahan republik Indonesia yang disebabkan oleh lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadi Timor Leste hingga saat ini.

2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Setelah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gusdur terpilih menjadi presiden Republik Indonesia melalui pemilu multipartai pertama sejak orde baru. Masa kepemimpinan Gusdur dimulai sejak 20 oktober 1999. Pada saat pemerintahan Gus Dur mulai terjadi banyak tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya kondisi perekonomian Indonesia lebih mengalami peningkatan, dan laju pertumbuhan PDB pada saat itu mencapai angka 4,8% angka ini lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya, laju inflasi dan tingkat suku bunga juga mulai rendah. Ini menandakan bahwa kondisi moneter republik Indonesia saat itu sudah cukup stabil (Affairs, 2020).

Pada masa pemerintahan Gus Dur seringkali menunjukkan sikap dan ucapan yang dapat menyebabkan kontroversi sehingga para pelaku bisnis sering kali merasa kebingungan. Sikap Gus Dur yang seperti ini juga menyebabkan terjadinya perseteruan dengan DPR. Selama pemerintahan Gusdur hubungan pemerintah Indonesia dan IMF menjadi kurang baik, ini disebabkan beberapa masalah salah satunya yaitu amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah, utamanya yaitu menyangkut kebebasan daerah untuk meminjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN tahun 2001 yang pelaksanaannya selalu saja tertunda sehingga menyebabkan penundaan pencairan bantuan IMF kepada pemerintah Indonesia, padahal saat itu roda perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada bantuan IMF tersebut. Hal ini juga menyebabkan para investor luar negeri berfikir

kembali untuk menanamkan modal mereka ke Indonesia. Ini ditunjukkan karena adanya pergerakan IHSG dan nilai kurs dollar terhadap rupiah. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan antara 30 maret 2000 – 8 maret 2001 menunjukkan penurunan karena kegiatan penjualan lebih besar dibanding pembelian pada perdagangan saham dalam negeri (Setiabudi, 2017). Perseteruan Gus Dur dengan DPR serta keterbatasan dalam penglihatan, kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, dan masalah kesehatan membuat Gus Dur diberhentikan sebagai presiden pada tanggal 23 juli (Hakim et al., 2017).

3. Pemerintahan Megawati

Setelah diberhentikannya Gusdur sebagai presiden beliau digantikan oleh seorang perempuan yaitu Megawati yang merupakan putri presiden pertama IR. Soekarno. Megawati merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Masa kepemimpinan megawati dimulai pada 29 Juli 2001. Program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh beliau adalah privatisasi BUMN, restrukturisasi keuangan, pengelolaan utang luar negeri, dan usaha kecil menengah (Hakim et al., 2017). Megawati juga memperbaiki hubungan dengan IMF sehingga menyebabkan IMF setuju untuk memperbarui program bantuannya yang sempat diberhentikan pada masa pemerintahan Gus Dur sebelumnya. Namun pada juli 2003 pemerintah mengumumkan bahwa bantuan IMF tidak akan dilanjutkan lagi.

Bantuan IMF akan berakhir pada 15 september 2003, pemerintah menerbitkan "*paket kebijakan Ekonomi Pra- Pasca-IMF*", yang dikenal dengan istilah "*white paper*". Paket ini mendapatkan respon positif dari pasar dan publik. Elemen utama dalam paket kebijakan tersebut adalah "menjaga stabilitas mikroekonomi, restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan, dan meningkatkan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja". Masa pemerintahan Megawati tergolong cukup sukses dalam pembangunan stabilitas makroekonomi akan tetapi kurang berhasil dalam penyelenggaraan reformasi mikro yang dijabarkan "*white paper*" utamanya dalam memperbaiki iklim investasi, ini ditandai

dengan investasi asing langsung yang tercatat negatif selama semester pertama 2004 (Aswicahyono & Christian, 2017).

4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Setelah pemerintahan Megawati, SBY terpilih sebagai presiden selanjutnya, pada masa ini perekonomian Indonesia sudah mulai stabil, perekonomian membaik dan kepercayaan investor juga ikut membaik. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, kurs dollar, dan tingkat inflasi. Namun pada tahun 2008-2009 perekonomian dunia sempat mengalami krisis, utamanya di Amerika Serikat. Baiknya krisis ekonomi tersebut tidak terlalu berdampak parah ke Indonesia seperti krisis ekonomi pada tahun 1998 karena 2 hal yaitu “Pemerintah sudah tanggap berbekal pengalaman sebelumnya, sehingga mengambil beberapa tindakan agar nilai rupiah terhadap dollar cukup stabil serta Perekonomian Indonesia sudah cukup terbantu dengan permintaan domestik yang cukup besar, sehingga ketika krisis terjadi di luar negeri, Indonesia masih bisa survive”. Pada saat itu juga terjadi “kasus bank century” yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan.

5. Pemerintahan Joko Widodo

Setelah SBY, Joko Widodo terpilih menjadi presiden Indonesia sejak 20 oktober 2014 hingga saat ini. Dengan terpilihnya Jokowi menjadi presiden hingga saat ini besar harapan rakyat Indonesia kepada beliau agar bisa memajukan perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi dibanding pada pemerintahan sebelumnya. Namun menurut salah satu penelitian (Hakim et al., 2017) selama setahun sejak beliau dilantik menjadi presiden kondisi perekonomian dunia tidak mendukung, terjadinya krisis Eropa dan krisis global turut berdampak ke Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan pada sektor ekonomi, yang ditandai dengan melemahnya rupiah, pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target dan fluktuasi harga (Wulandari, 2016).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terus melambat, hingga mencapai titik terendah di angka 4,7% pada triwulan II. Sebagai respon dari kondisi yang terjadi tersebut Jokowi memutuskan untuk melakukan reformasi ekonomi dengan

meluncurkan “Paket Kebijakan Ekonomi” pada september 2015. Paket kebijakan yang paling komprehensif yang memiliki cakupan yang paling luas bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, mempercepat proyek strategis nasional, serta meningkatkan investasi di sektor properti.

Kebijakan yang telah diluncurkan menargetkan untuk menghasilkan 203 regulasi (terdiri dari 154 Peraturan Menteri dan 49 Peraturan Presiden) yang menggantikan regulasi yang dianggap bermasalah. Namun reformasi ekonomi yang dilakukan dengan meluncurkan paket kebijakan ini masih mendapatkan masalah dalam efektivitas implementasi serta dalam usaha pemantauan dan evaluasi. Sehingga pemerintah membentuk empat gugus tugas yang bertujuan untuk memantau dan memastikan bahwa paket kebijakan ekonomi ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, hingga ke tingkat daerah, serta memformulasikan langkah aksi untuk mengatasi hambatan spesifik dalam pelaksanaan (Aswicahyono & Christian, 2017).



(Sumber: Canva, 2023)

Gambar 4. Skema Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Reformasi

DAFTAR PUSTAKA

- Aderoben, A., & Septiansi, I. (2022). *EKONOMI PERANG JEPANG DI PALEMBANG*. 6(1), 13–28. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.4160>
- Adji, H. S. (2020). Proses pembangunan ekonomi dalam perspektif historis komparasi antara Indonesia dan Jepang. *JEP*, 2(3), 324–336. <https://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/6841/6233>
- Affairs, F. E. (2013). *Perekonomian indonesia pdf Perekonomian indonesia pdf*. 2012–2013.
- Amelia, F. (2020). *Pendudukan Jepang di Indonesia*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JxwAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perekonomian+indonesia+masa+pendudukan+jepang&ots=8IccMITKxn&sig=gBlJshqtgW_zB1Hd_61J5s2wZU&redir_esc=y#v=onepage&q=perekonomian indonesia masa pendudukan jepang&f=false
- Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). Development of Economic Reformation in Indonesia 1997-2016 (Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016). *Centre for Strategic and International Studies*, 02, 1–16.
- Fahrika, A. I., & Zulkifli. (2020). *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Hakim, A., Tamtomo, E., & Fahrika, Andi Ika., Z. (2017). Perekonomian Indonesia: Sejarah Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi. *Ekonomika-Bisnis*, 3(2), 161–180.
- Hasibuan, R. R. A. (2018). *Buku Ajar Perekonomian Indonesia*. <https://books.google.co.id/books?id=SJeLDwAAQBAJ&pg=PA276&dq=ketimpangan,+ekonomi+regional&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwidxNGA2rHvAhWjIbcAHaWEDb8QuwUwBnoECAkQCQ#v=onepage&q=ketimpangan%2C ekonomi regional&f=false>
- Jamil, H., & Santosa, D. B. (2017). Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1(1), 1–12.

- Klaudia, M. W., & Wartha, I. B. N. (2020). Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 10(1), 69–75. <https://doi.org/10.36733/jsp.v10i1.699>
- Kurniawan, A. R. (2020). *PEREKONOMIAN INDONESIA MASA PENDUDUKAN JEPANG*. 13.
- Mahfudzoh, A. (2018). *Hubungan Perdagangan Cirebon dan Sunda Kelapa Abad XVI : Suatu Studi Sejarah Ekonomi*.
- Mubyarto. (2022). Peran Ilmu Ekonomi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 17(3),233-242 <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6807/5343>
- Purwanda, S. (2022). *Tanaman Rempah Asli Indonesia the Loss of Exclusive Rights of Indonesian*. 8(1).
- Safitri, I. (2017). Sejarah Perekonomian Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda 1825-1940. *Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Raden Fatah*, 1–137.
- Setiabudi, A. W. (2017). Rasio Pajak Optimal Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1970-2008. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 151–179. <https://doi.org/10.25170/jara.v10i2.44>
- Wulandari, T. D. (2016). Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Menurut Kacamata 5 Media Massa di Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), 88. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.102>
- Zulkarnain, M. E. (2016). Peran dan Kebijakan Zaman Orde Baru Dalam Sektor Ekonomi Indonesia. *IAIN Tulungagung*, 4(1), 38–39.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilibekov, N., Sarfo, C., Dandis, O., & Al-Haj Eid, M. (2021). Linking bank advertising to customer attitudes: The role of cognitive and affective trust. *Management Science Letters*, *11*, 1083–1092. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.11.0031>
- Faktor, P., Terhadap, M., Bermasalah, P., Hernawati, H., Oktaviani,) &, & Puspasari, R. (2018). Journal of Islamic Finance and Accounting. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, *1*(1), 29–44. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- G SURYAPUTRA filipus, F. A., & Bandi Doddy Setiawan, yahoo.com. (2017). PERKEMBANGAN PENELITIAN KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA. In *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 17, Issue 2). www.jab.fe.uns.ac.id
- Masrufah, L. (2022). *KEBIJAKAN MONETER FISKAL DALAM PEREKONOMIAN*. https://www.academia.edu/download/58097371/TUGAS_METLIT_AB STRAK_1.pdf.
- Simatupang, H. B. (2019). PERANAN PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA. In *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* (Vol. 6, Issue 2).
- Sriyono. (2013). *STRATEGI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA*.
- Wbba, A., & Pratomo, W. A. (2013). *ANALISIS FUNDAMENTAL DAN RESIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS LQ 45*.



PEREKONOMIAN INDONESIA

Sebelum kemerdekaan Indonesia, perekonomian Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda. Pada masa tersebut, ekonomi Indonesia lebih banyak terfokus pada pengembangan sektor perkebunan, terutama kopi, tembakau, tebu, karet, dan kelapa sawit yang diusahakan oleh Belanda.

Pada masa orde lama, perekonomian Indonesia sangatlah buruk. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia masih belum lepas dari jajahan Belanda. Pada masa orde lama, Negara Indonesia menganut sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Sementara, pada masa orde baru, pemerintah mengadopsi kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi, yang lebih banyak terfokus pada pengembangan industri manufaktur dan penggunaan modal asing.

Buku ini mengkaji perekonomian Indonesia. Buku ini memiliki keunggulan yaitu disusun secara teoritis sesuai dengan sejarah perekonomian Indonesia, dan menggunakan analisis kajian yang mudah dipahami, sehingga buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya sebagai referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam proses perkuliahan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-625-147-185-7 (P13F)



9 786231 471857